

# PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS PAILIT

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum UPN “ VETERAN “ JAWA TIMUR



Oleh :

SEPTIAN GERALDI ANANTATUR NAPITUPULU  
NPM. 0971010081

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

# PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS PAILIT

Disusun oleh

SEPTIAN GERALDI ANANTATUR NAPITUPULU  
NPM. 0971010081

Telah disetujui mengikuti ujian skripsi

Menyetujui  
Dosen pembimbing

MAS ANIENDA TIEN, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,  
Dekan

HARIYO SULISTIANTORO, SH., MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI  
PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS  
PAILIT

Oleh :

SEPTIAN GERALDI ANANTATUR NAPITUPULU  
NPM. 0971010081

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 5 Juni 2013

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

MAS ANIENDA TIEN, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0223

MAS ANIENDA TIEN, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0223  
2.

SUTRISNO, SH., M.Hum  
NIP. 19601212 198803 1 001  
3.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.Hum  
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,  
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI  
PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS  
PAILIT

Oleh :

SEPTIAN GERALDI ANANTATUR NAPITUPULU  
NPM. 0971010081

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal 5 Juni 2013

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

MAS ANIENDA TIEN, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0223

SUTRISNO, SH., MHum  
NPT. 19601212 198803 1 001

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., H.Hum  
NIP. 3 8202 07 0221  
3.

MAS ANIENDA TIEN, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,  
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM  
NIP. 19620625 199103 1 001  
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septian Geraldı Anantatur Napıtupulu  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 30 September 1989  
NPM : 0971010081  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jln. Gubeng Kertajaya 4A no 34

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :  
“PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITUR YANG DIPUTUS  
PAILIT” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah  
benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya  
bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum)  
yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh  
rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
PEMBIMBING

Surabaya, 30 Mei 2013  
PENULIS

Mas Anienda Tien, SH., MH  
NPT. 3 7709 07 0023

Septian Geraldı  
NPM. 0971010081

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Di sini penulis mengambil judul “PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DIPUTUS PAILIT”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Haryo Sulistyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Gendut Sukarno, Ms selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Titik Tejaningsih SH, MHum, selaku Hakim Pengadilan Niaga
5. Bapak Subani, SH., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Mas Anienda Tien, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang penulis hormati yang mana tidak pernah lelah untuk membimbing penulis sampai Skripsi ini selesai.
7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Bapak Sariyanto, S.Sos dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

9. Bapak Aji Isa SH, MH, selaku Panitera Pengadilan Niaga.
10. Seluruh pegawai Pengadilan Niaga yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu atas kerjasama selama penulisan skripsi ini.
11. Bapak Ahmad Fanani SE, selaku juru lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12. Kedua Orang Tua saya tercinta, Kakak dan Adikku tersayang, seluruh Saudara yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
13. Sahabat-sahabatku Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2009, yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat

Surabaya, Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAKSI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.5.1.1 Pengertian Kepailitan .....	7
1.5.1.2 Asas Kepailitan .....	9
1.5.1.3 Mekanisme Permohonan Pailit .....	10
1.5.1.4 Syarat – Syarat Pernyataan Kepailitan .....	11



1.5.1.5	Syarat Pemohon Pailit.....	13
1.5.1.6	Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan.....	13
1.5.1.6.1	Pihak Pemohon Pailit.. ..	13
1.5.1.6.2	Hakim Niaga.. ..	14
1.5.1.6.3	Hakim Pengawas.....	14
1.5.1.6.4	Kurator.....	15
1.5.1.6.5	Panitia Kreditur .....	15
1.5.1.7	Pihak – Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	16
1.5.1.8	Putusan Pailit .....	16
1.5.1.9	Akibat Kepailitan Bagi Debitor.....	17
1.5.1.10	Mekanisme Lelang Dalam Kepailitan.....	18
1.5.1.11	Berakhirnya Kepailitan .....	21
1.5.1.11.1	Perdamaian ( Accoord ) dalam kepailitan.....	21
1.5.1.11.2	Insolvensi .....	22
1.5.1.11.3	Rehabilitasi.....	23
1.5.2	Tinjauan Umum Lelang .....	23
1.5.2.1	Pengertian Lelang .....	23
1.5.2.2	Pejabat Yang Berwenang Melelang.....	26
1.5.2.3	Klasifikasi Lelang .....	26
1.5.2.4	Asas Lelang .....	27
1.5.2.5	Mekanisme Lelang Secara Umum .....	29
1.5.3	Tinjauan Umum Kurator .....	31

1.5.3.1	Kedudukan Kurator Dalam Hukum Pailit .....	31
1.5.3.2	Wewenang Kurator .....	32
1.5.3.3	Tanggung Jawab Kurator.....	33
1.5.3.4	Kurator Sementara.....	34
1.6	Metode Penelitian.....	39
1.6.1	Jenis Penelitian .....	36
1.6.2	Data .....	37
1.6.3	Metode Pengumpulan Data.....	39
1.6.4	Metode Analisa Data.....	40
1.6.5	Sistematika Penulisan.....	43
Bab II	Faktor Penyebab Penolakan Lelang.....	45
2.1	Adanya Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga .....	45
2.2	Kesalahan Administrasi Dalam Permohonan Lelang .....	52
BAB III	UPAYA Hukum Penolakan Lelang .....	56
3.1	Konsekuensi Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pailit .....	56
3.2	Mekanisme Pengajuan Gugatan Perlawanan .....	59
BAB IV	PENUTUP .....	74
4.1	Kesimpulan .....	74
4.2	Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Jumlah Gugatan Perlawanan 2011.....	71
Tabel 2	:	Jumlah Gugatan Perlawanan 2012.....	71
Tabel 3	:	Jumlah Gugatan Perlawanan 2013.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Mekanisme Gugatan Perlawanan Di Pengadilan Niaga Surabaya...	...61
Gambar 2	: Mekanisme Kasasi Di Pengadilan Niaga Surabaya.....	65
Gambar 3	: Mekanisme Peninjauan Kembali Di Pengadilan Niaga Surabaya.....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Pengadilan Niaga.
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Wawancara Pengadilan Niaga.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Septian Geraldi  
NPM : 0971010081  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 30 September 1989  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

PENOLAKAN LELANG TERHADAP HARTA DEBITUR YANG DIPUTUS  
PAILIT

**ABSTRAKSI**

Penulisan ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penolakan lelang harta pailit dan upaya hukum penolakan lelang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Hasil Pembahasan terhadap permasalahan dapat disimpulkan bahwa dalam praktik gugatan perlawanan, pihak ketiga merasa dirugikan apabila obyek tersebut dimasukkan ke dalam beodel pailit untuk dilelang. alasannya sendiri dikarenakan adanya perjanjian jual beli pihak ketiga sebelum adanya putusan pailit serta pembayaran utang kepada pihak ketiga menggunakan barang. Sedangkan kesalahan administrasi permohonan lelang terjadi secara umum dikarenakan belum lengkapnya berkas atau dokumen obyek lelang. Selain itu konsekuensi dari perlawanan tersebut terhadap pelaksanaan putusan pailit hampir semua berjalan karena sifat serta merta akan tetapi ada yang ditunda dikarenakan adanya perlawanan secara fisik dan upaya hukumnya dengan mengajukan perlawanan ( *derden verzet* ) kepada pengadilan niaga yang mengadili perkara permohonan pailit tersebut dan apabila tidak puas ada upaya hukum lagi yakni kasasi dan peninjauan kembali

Kata kunci : Pailit, lelang, harta debitur

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang baik dalam suatu negara adalah pembangunan yang dapat berimbas langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkesinambungan. Dalam bidang ekonomi, kemajuan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari yang kegiatan usaha atau bisnis, hal ini dikarenakan kegiatan usaha atau bisnis merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.

Dalam situasi perkembangan bisnis saat ini banyak sekali perusahaan – perusahaan yang mengandalkan utang sebagai modal untuk mengembangkan bisnisnya, dimana dalam dunia usaha utang merupakan hal yang sudah lumrah dan biasa terjadi dalam dunia perdagangan sebab utang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis.

Utang piutang yang terjadi dalam dunia bisnis pastilah akan menyebabkan suatu hubungan hukum antara pemberi utang dan penerima utang atau dalam dunia hukum lebih dikenal kreditur dan debitur. Termasuk pula aspek dari segi hukum apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Salah satu permasalahannya yang sering terjadi dalam kehidupan yang nyata ini adalah bagaimana apabila debitur tidak dapat lagi membayar hutang – hutangnya, tentu hal ini akan sangat merugikan para kreditur – kreditur yang meminjamkan dana kepada debiturnya. Dalam hal ini dibutuhkanlah suatu hukum guna menjamin kepentingan atau hak – hak dari pada

kreditur agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam perkembangan dunia usaha menyangkut masalah pembayaran utang yang macet.

Hukum yang dimaksud disini ialah hukum kepailitan dimana hukum kepailitan merupakan suatu jawaban yang pasti secara hukum guna mengembalikan atau menjamin hak dari pada kreditur agar tidak hilang. Sebab di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu atau pun tidak mau membayar hutangnya kepada kreditur ( disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan memaksa ) maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut yaitu dikenal dengan “ kepailitan “ dan “ penundaan pembayaran “<sup>1</sup> Pailit merupakan suatu keadaan dimana suatu debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari debitur yang telah mengalami kemunduran Untuk membuat suatu debitur pailit maka kreditur harus menggunakan jalur pengadilan untuk mendapatkannya, sebab dalam undang – undang kepailitan tersebut dengan tegas menyatakan hanya pengadilan ( putusan hakim ) yang dapat menjatuhkan putusan pailit hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat ( 1 ) undang – undang kepailitan. sedangkan Akibat hukum pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hal. 21 - 22



Pada dasarnya suatu putusan hakim dalam hal penjatuhan pailit terhadap debitur haruslah dihormati dan ditaati oleh para pihak, hal ini dikarenakan putusan tersebut mempunyai suatu kekuatan hukum yang berlaku bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini putusan hakim tersebut mempunyai / berisikan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai suatu konsekuensi hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dalam hal kepailitan yang mana dalam putusan hakim menyatakan pailit maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para kreditor dan debitor. Sebagaimana telah berkali – kali diterangkan, pengadilan ( hakim ) dengan putusannya menetapkan hubungan hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Serta yang harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “keluar”, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.

Dalam hal kepailitan yang mana dalam putusan hakim menyatakan pailit maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para kreditor dan debitor. Dimana putusan tersebut menyatakan debitor terbukti pailit maka hakim akan memerintahkan hakim pengawas untuk menunjuk kurator untuk melelang harta kekayaan debitor,

---

<sup>2</sup> R. Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. 3, (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 130.

guna hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang – hutangnya kepada para kreditor. Dan dalam melakukan pemberesan harta debitur pailit kurator biasanya akan menunjuk balai lelang untuk melakukan lelang harta debitur ( pailit ).

Akan tetapi dalam praktek paska putusan pailit permasalahan yang sering terjadi muncul apabila ada pihak ketiga yang mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pailit tersebut yang pada umumnya meminta agar mengeluarkan sebagian harta debitur pailit untuk tidak dilelang . Hal ini dapat kita lihat secara nyata banyak sekali gugatan perlawanan putusan pailit yang ditujukan ke pengadilan guna membatalkan lelang harta debitur ( pailit ), yang dimaksud harta debitur disini ialah harta atau asset yang dimasukan kurator kedalam beodel pailit untuk dilakukan lelang.

Hal ini akan menjadi permasalahan baru yang mana disatu sisi gugatan ini dapat saja merugikan para kreditor – kreditor dari debitur tersebut di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya bisa saja terjadi kelalaian oleh kurator dalam pemberesan harta pailit tersebut, disini dapat dilihat bahwa gugatan perlawanan terhadap putusan pailit tersebut ternyata ada yang dimenangkan dan juga ada yang dikalahkan. Pada umumnya apabila dimenangkan berarti telah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pemberesan harta debitur tersebut dan apabila dikalahkan berarti dalil – dalil perlawanan tersebut tidak terbukti.

Dalam hal gugatan perlawanan putusan pailit tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan tersendiri yakni bagaimana pelaksanaan putusan pailit tersebut apabila ada gugatan perlawanan, apakah pelaksanaan putusan pailit itu

ditunda sampai ada putusan dari gugatan perlawanan yang berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaan putusan pailit tetap berjalan meskipun ada gugatan perlawanan putusan pailit itu sendiri. Hal ini sangatlah penting dalam memutuskan menunda atau meneruskan pelaksanaan putusan pailit tersebut sebab dalam prakteknya dalam gugatan perlawanan tersebut asset yang diperebutkan itu nilainya sangat besar. Dan tentu dalam hal penjatuhan putusan dalam gugatan perlawanan tersebut akan memberikan dampak hukum dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan skripsi dengan judul : “penolakan lelang terhadap harta debitor yang diputus pailit.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah alasan penolakan lelang terhadap harta pailit ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan setelah terjadinya penolakan lelang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mencari tahu faktor – faktor penyebab terjadinya penolakan lelang terhadap harta pailit
2. untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan setelah terjadinya penolakan

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis
  - a. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah di fakultas hokum Universitas Pembangunan Nasional “veteran “ Jawa Timur.

- b. Untuk memberikan sumbangan dalam bentuk pola pemikiran khususnya mengenai kepailitan.

## 2. Praktis

- a. Memperluas pemahaman, membentuk pola pikir yang kritis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah di miliki sewaktu kuliah dan kenyataan di lapangan.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum Kepailitan

#### 1.5.1.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan sebenarnya sejak ada sejak jaman dahulu. Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan kepailitan itu ? arti orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersmbunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.<sup>3</sup> Menurut poerwadarminta, “ pailit” artinya “ bangkrut “ ; dan “ bangkrut “ artinya menderita kerugian besar hingga jatuh ( perusahaan, toko, dan sebagainya ).<sup>4</sup>

Akan tetapi pengertian kepailitan secara umum terutama menurut ilmu hukum pailit diartikan sebagai sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Praktek, Cetakan Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 7

<sup>4</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 1

dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan sebagaimana diatur dalam undang – undang. Yang dimaksud dalam sitaan umum disini karena barang yang disita bukan untuk kepentingan satu kreditur saja akan tetapi untuk kepentingan seluruh kreditur, Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan jalan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah utang – piutang yang sudah macet dan keadaan tidak mampu lagi atau berhenti membayar dengan tujuan membagikan harta debitur kepada para krediturnya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini karena apabila ada putusan pailit maka akan berlaku pasal 1132 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yaitu “ Barang – barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing – masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan – alasan sah untuk didahulukan. “. Yang dimaksud kreditur yang didahulukan ialah kreditur pemegang hak istimewa seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan undang – undang kepailitan diperlukan untuk

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur.
2. Untuk menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan debitur atau kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, misalnya saja debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu, yang merugikan kreditor lainnya, atau debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan debitur yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya dari kreditor.<sup>5</sup>

#### 1.5.1.2 Asas Kepailitan

Dalam hukum kepailitan mengenal asas – asas yang berlaku dalam praktek pelaksanaannya, yang mana asas – asas ini merupakan bagian dari hukum kepailitan itu sendiri, asas – asas tersebut ialah

1. Asas Keseimbangan  
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat

---

<sup>5</sup> Ibid., Hal 3

mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>6</sup>

#### 1.5.1.3 Mekanisme Permohonan Pailit

Dalam hal gugatan atau sengketa kepailitan, maka harus didahului dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Hal pengajuan permohonan pailit tersebut telah diatur Undang - Undang Kepailitan dan PKPU No 37 tahun 2004, yakni terdapat dalam pasal 6 yang isinya sebagai berikut :

1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan
2. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
3. Panitera wajib menolak pendaftaran pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 3 ), ayat ( 4 ), dan ayat ( 5 ) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam ayat tersebut.

---

<sup>6</sup> Law Consultant, Kepailitan di Indonesia, [http : // klickupailit. wordpress. com / 2011 / 05 / 21 / kepailitan – di – Indonesia /](http://klickupailit.wordpress.com/2011/05/21/kepailitan-di-Indonesia/), diakses pada hari Rabu, tanggal 02 maret 2013 ; 20.00

4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
7. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
8. Putusan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan dan salinan putusan harus sudah dikirim ke para pihak secara kilat oleh juru sita 3 hari setelah putusan pailit diucapkan.

#### 1.5.1.4 Syarat – Syarat Pernyataan Kepailitan

Syarat pernyataan kepailitan merupakan suatu hal yang sangat penting sebab hal itu merupakan suatu dasar atau rambu yang harus digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan pailit. Hal ini dikarenakan agar penjatuhan putusan pailit sesuai dengan perundang – undangan dan tidak dilakukan asal – asalan tanpa arah yang jelas dan tidak menimbulkan kontroversial dalam penegakan hukum itu sendiri. Seorang debitor ( yang berhutang ) harus dapat dikatakan dalam keadaan pailit kalau telah dinyatakan oleh hakim . berdasarkan pasal 1 ayat (1) ini, maka agar debitor dapat dinyatakan pailit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- a. Debitor mempunyai dua orang atau lebih kreditor. Ini berarti kalau debitor mempunyai seorang kreditor saja, maka tidak dapat menggunakan ketentuan kepailitan.
- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau dapat ditagih.<sup>7</sup>

Persyaratan pertama diatas selaras yang harus memiliki minimal dua kreditor merupakan ketentuan kepanjangan dari pasal 1132 KUH Perdata yang mewajibkan pembagian merata kepada seluruh kreditornya, sedangkan persyaratan kedua debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang tidak ada penjelasan lebih lanjut oleh undang – undang, artinya hal itudiserahkan kembali ke doktrin hakim.

Hal itu juga selaras dengan syarat pailit dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Arti dari pasal diatas apabila dijabarkan harus ada dua kreditor atau lebih dan tidak membayar utang kepada salah satu

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 14

kreditur pada waktu jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan yang dimaksud kreditor dalam kepailitan dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Kreditor konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditor secara bersama – sama memperoleh pelunasan ( tanpa ada yang didahulukan ) yang dihitung berdasarkan pada besarnya masing – masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan.

2. Kreditor preferen

Yaitu kreditor yang oleh undang – undang, semata – mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang – undang yang diberikan kepada seorang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya.

3. Kreditor separatis.

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in rem, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Jono, Op.cit., hal 6 - 9

#### 1.5.1.5 Syarat Pemohon Pailit

Dalam hal ini ada beberapa klasifikasi subyek hukum yang dapat menjadi pemohon pailit, disini dapat dilihat Sesuai dengan pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU yang dapat menjadi pemohon pailit adalah

1. Debitor.  
Dalam hal ini debitor merupakan pihak yang berhutang dan tidak dapat lagi membayar utang – utangnya atau keadaan berhenti membayar serta harus memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam hal ini debitor dapat orang perorangan atau badan hukum.
2. Kejaksaan.  
Kejaksaan dalam hal ini dapat mengajukan permohonan pailit terhadap subyek hukum untuk menjalankan kepentingan umum.
3. Bank Indonesia.  
Bank Indonesia dapat bergerak menjadi pemohon pailit apabila debitur yang akan dimohonkan pailit ialah bank – bank yang keadaan ekonominya sudah tidak baik.
4. Badan Pengawas Pasar Modal.  
Badan pengawas dalam hal ini dapat mengajukan permohonan pailit dalam hal debiturnya ialah perusahaan efek, lembaga kliring dan penjamin, bursa efek.
5. Menteri keuangan  
Menteri keuangan dapat mengajukan permohonan pailit dalam hal debiturnya ialah perusahaan asuransi, perusahaan resuransi, dana pension, atau badan usaha milik Negara yang bergerak untuk kepentingan publik.

#### 1.5.1.6 Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

##### 1.5.1.6.1 Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan ialah pemohon pailit, dalam hal ini pemohon pailit sesuai dengan ketentuan terdiri dari beberapa subyek hukum yaitu :

1. Debitur
2. Kejaksaan
3. Bank Indonesia
4. Badan pengawas pasar modal
5. Menteri keuangan
6. kreditor.<sup>9</sup>

#### 1.5.1.6.2 Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis ( tidak boleh hakim tunggal ) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan mahkamah agung.<sup>10</sup>

#### 1.5.1.6.3 Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas disamping pengangkatan kuratornya.<sup>11</sup> Tugas utama dari kurator ialah melakukan pemberesan harta pailit, supaya jangan terjadi kesewenagwenangan yang dilakukan kurator maka diperlukanlah seseorang unyuk mengawasi kurator tersebut dalam menjalankan tugasnya. Disini

---

<sup>9</sup> Undang – Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 4 - 5

<sup>10</sup> Munir Fuady, Op.cit., hal 36

<sup>11</sup> Ibid., hal 36

diperlukanlah Hakim Pengawas untuk mengawasi seluruh tindakan atau kegiatan Kurator dalam hal melakukan pemberesan harta pailit tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 65 UUK dan PKPU.

#### 1.5.1.6.4 Kurator

Menurut UUKepailitan dan PKPU tugas utama dari kurator ialah melakukan pemberesan harta debitor ( pailit ), pemberesan ini meliputi seluruh kekayaan atau asset dari debitor ( pailit ), terkecuali barang tertentu yang menurut undang – undang tetap berada dalam kekuasaan debitor. dalam hal tugas pemberesan terhadap harta pailit ini sangatlah berat dan beresiko sehingga kurator harus berhati – hati dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu pula maka persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi kurator ini oleh undang – undang kepailitan diatur secara relatif ketat.<sup>12</sup>

#### 1.5.1.6.5 Panitia Kreditur

Pada dasarnya panitia kreditur merupakan perwakilan dari para kreditur itu sendiri, sehingga panitia kreditur akan mempertahankan hak – hak dari kreditur itu

---

<sup>12</sup> Ibid., hal 39

sendiri. Ada dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh undang – undang kepailitan, yaitu :

1. Panitia kreditur sementara ( yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit )
2. Panitia kreditur ( tetap ) yakni yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit diangkat panitia kreditur sementara<sup>13</sup>

#### 1.5.1.7 Pihak – Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Bila dilihat dari pernyataan pailit yakni keadaan berhenti membayar maka hampir seluruh subyek hukum baik badan hukum maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat dalam pasal 2 UUKepailitan dan PKPU. Berdasarkan hal tersebut, maka yang dapat dinyatakan pailit ialah :

1. Setiap orang, tidak peduli apakah ia menjalankan perusahaan ataupun tidak
2. Badan – badan hukum, misalnya perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan perkumpulan lainnya yang berbadan hukum.
3. Harta warisan, maksudnya harta dari seorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit berhubung orang yang meninggal dunia itu berada dalam keadaan berhenti membayar atau harta

---

<sup>13</sup> Ibid., hal 40

warisannya pada saat meninggal si pewaris tidak mencukupi untuk membayar hutang

4. Setiap wanita bersuami yang dengan tenaga sendiri melakukan pekerjaan tetap atau suatu perusahaan, atau mempunyai kekayaan sendiri.<sup>14</sup>

#### 1.5.1.8 Putusan Pailit

Putusan hakim merupakan suatu putusan yang harus ditaati oleh berbagai pihak yang bersengketa, hal ini karena putusan hakim mempunyai kekuatan memaksa yang harus ditaati dan dihormati. Dalam Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan, hal ini mengacu pada pasal 8 ayat ( 5 ) UUKepailitan dan PKPU. Dalam hal putusan pailit juga harus berisikan pertimbangan hukum yang mendasari putusan pailit tersebut. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit mempunyai daya “ dapat dilaksanakan terlebih dahulu “ yang sering disebut putusan *uitvoerbaar bij vooraad*. Putusan *uitvoerbaar bij vooraad* atau putusan *serta merta*, yaitu suatu putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Dasar hukum

---

<sup>14</sup> Zainal Asikin, Op.cit.,hal 29

<sup>15</sup> Jono, Op.cit., hal 101

putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dapat dilihat pada UUK pasal 8 ayat ( 7 ) yang isinya

Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6 ) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

UUK pasal 16 ayat ( 1 ) isinya

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

#### 1.5.1.9 Akibat Kepailitan Bagi Debitor

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan pailit maka hal itu akan menimbulkan akibat hukum terhadap debitur yakni seluruh harta yang dimiliki oleh debitur berada dalam sitaan umum sejak putusan pailit diucapkan. Sitaaan yang dimaksud ialah sitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitur dan juga akibat kepailitan menyebabkan debitur kehilangan segala hak keperdataan dibidang pengelolaan harta kekayaannya. Secara yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan dua mode pemberlakuan, yaitu

##### 1. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum ( by the operation ) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. dalam hal



seperti ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditur dan siapapun yang dilibatkan dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis.

## 2. Berlaku secara Rule of season

Untuk akibat – akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku rule of season. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak – pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukannya.<sup>16</sup> Sebagai contoh tindakan penyegelan, dalam hal ini penyegelan dapat dilakukan atas persetujuan hakim pengawas, jadi tidak langsung berlaku otomatis melainkan harus ada persetujuan terlebih dahulu.

### 1.5.1.10 Mekanisme Lelang Dalam Kepailitan

Dalam hal pelaksanaan putusan pailit maka akan dilakukan pemberesan harta pailit yang secara umum akan dilakukannya lelang atas harta yang masuk dalam beodel pailit. Dalam hal lelang harta pailit tersebut secara umum hampir sama dengan lelang pada umumnya, yakni

1. Surat permohonan lelang
2. Penelitian oleh Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang
3. Surat Penetapan Lelang.
4. Pengumuman Lelang.
5. Penyetoran uang jaminan.
6. Lelang.

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, Op.cit., hal 65

## 7. Risalah lelang.<sup>17</sup>

### Pembahasan :

#### 1. Surat Permohonan lelang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 93 / PMK.06 / 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan bahwa untuk melaksanakan lelang harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan lelang dalam bentuk surat permohonan kepada kantor lelang

- a. Setiap Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang, mengajukan permohonan kepada kepala kantor lelang
- b. Permohonan diajukan secara tertulis
- c. Permohonan disertai dengan dokumen yang berisi syarat – syarat.<sup>18</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pasal 10 ayat ( 1 ) PMK No 93 / PMK.06 / 2010 yaitu :

Penjual / Pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

Disini penjual wajib mengajukan permohonan lelang apabila ingin melakukan penjualan secara lelang. Dalam hal kepailitan maka surat permohonan lelang diajukan oleh kurator, hal ini karena pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Akan tetapi khusus pemegang hak istimewa maka pemegang jaminan yang mengajukan permohonan.

#### 2. Penelitian Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Penelitian oleh KPKNL bertujuan untuk memeriksa surat kelengkapan permohonan lelang dari pemohon lelang. Termasuk dokumen – dokumen persyaratan lelang, seperti salinan foto copy surat keputusan penunjukan penjual, syarat lelang dari penjual, daftar barang yang akan dijual. Apabila dalam hal lelang ini merupakan eksekusi dari putusan pailit maka juga dilampirkan :

- a. Salinan / foto copy putusan pailit dari pengadilan negeri

---

<sup>17</sup> Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal 128

- b. surat pernyataan dari kurator yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana
  - c. bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang.
  - d. Daftar beodel pailit.<sup>19</sup>
- 3. Surat Penetapan Lelang.  
Di sini surat penetapan lelang diajukan kepada kepala KPKNL guna meminta meminta penetapan jadwal lelang.
- 4. Pengumuman Lelang.  
Pengumuman lelang merupakan suatu hal penting dalam mekanisme lelang, hal ini dikarenakan atau bertujuan untuk memberitahu kepada khalayak umum agar mengetahui dan datang atau mengikuti lelang tersebut. Sebab dalam pengumuman lelang juga berisikan tentang identitas penjual, waktu tempat pelaksanaan lelang, nama dan jenis barang, lokasi luas apabila yang dilelang tanah. Dari hal diatas dapat diambil kesimpulan
  - a. Dari segi tujuan pengumuman lelang merupakan usaha atau upaya mengumpulkan peminat yang akan ikut ambil bagian dalam pelelangan yang akan dilaksanakan
  - b. Dari segi hukum, pengumuman lelang merupakan persyaratan formil keabsahan penjualan secara lelang.<sup>20</sup>
- 5. Penyetoran uang jaminan.  
Uang jaminan penawaran lelang adalah uang yang disetor kepada kantor lelang / balai lelang pejabat lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang.<sup>21</sup> Uang jaminan dalam lelang merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi calon pembeli barang lelang Agar dapat menjadi peserta lelang, hal ini disebabkan untuk menghindari apabila peserta pemenang lelang tidak melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran terhadap barang lelang. sedangkan bagi peserta yang kalah dalam penawaran lelang uang jainan akan dikembalikan kepada peserta lelang.
- 6. Lelang.  
Lelang merupakan suatu proses yang mana penjual menawarkan barang kepada pembeli ( peserta lelang ) Dalam hal ini penjual menawarkan barang yang akan dijual kepada peserta lelang dan akan mencari penawaran tertinggi dari peserta lelang tersebut. Apabila lelang tersebut laku maka peserta yang menang lelang harus melakukan pelunasan terhadap harga yang ia tawarkan.

---

<sup>19</sup> Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara PER-03 / KN / 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit., hal 141 - 142

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.06 / 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka ( 10 )

7. Risalah lelang.

Tanpa risalah lelang, pelaksanaan penjualan lelang yang dilakukan pejabat lelang, tidak sah ( invalid ). Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal – hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.<sup>22</sup>

1.5.1.11 Berakhirnya Kepailitan

1.5.1.11.1 Perdamaian ( Accoord ) Dalam kepailitan

Dalam beberapa accord tidak ada kesamaan dalam hal accord itu sendiri, ada yang menggunakan istilah “akur” ada yang menggunakan istilah “ akor “ dan lain sebagainya. Didalam kamus hukum bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwardaminta di artikan akor atau akur sebagai padanan dari “ cocok “, sesuai, sepakat atau setuju.<sup>23</sup> Perdamaian atau accord adalah suatu perjanjian antara debitor pailit dan kreditor. Dalam perjanjian ini debitor menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>24</sup> Perdamaian sendiri merupakan jalan yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa, sebab jalan keluar dari perdamaian itu pasti membawa yang terbaik bagi para pihak, disatu sisi debitor dapat dapat menjalankan usahanya disatu sisi kreditor

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit.,hal 169

<sup>23</sup> Zainal Asikin, Op.cit., hal 65

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, Op.cit.,hal 133

dapat pengembalian hutang secara penuh. Dalam rapat perdamaian tersebut akan tetapi apabila gagal dalam perdamaian maka harta debitor akan dijual dengan cara lelang untuk melunasi hutang – hutangnya kepada kreditor dan sebagai imbasnya dengan cara lelang yang pada umumnya harga dibawah standart maka para kreditor juga tidak akan menerima pengembalian secara penuh. Dalam hal perdamaian tadi harus dapat dari pengesahan Pengadilan Niaga dan putusan perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirilah kepailitan.

#### 1.5.1.11.2 Insolvensi

Hal terakhir dari kepailitan ialah insolvensi, yang mana harta pailit tersebut dijual ke muka umum, dan hasilnya dibagikan kepada kreditor sesuai dalam rapat pencocokan verifikasi. Dalam hal ini maka penjualan akan dilakukan oleh balai lelang yang mengambil tindakan – tindakan dalam hal pemberesan harta debitor pailit yaitu :

1. Melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit, dan melakukan penagihan terhadap piutang – piutang sipailit yang mungkin ada ditangan pihak ketiga. Penjualan ini dapat saja dilakukan dibawah tangan sepanjang mendapat persetujuan hakim pengawas

2. Meneruskan perusahaan si pailit apabila dipandang menguntungkan dan harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas
3. Membuat suatu daftar pembagian berisi : jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama kepailitan, nama – nama kreditur dan jumlah tagihan yang disahkan, pembayaran yang akan dilakukan terhadap tagihan tersebut.
4. Membagikan seluruh harta si pailit yang telah dilelang dan diuangkan<sup>25</sup>

#### 1.5.1.11.3 Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitur yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang menerangkan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya.<sup>26</sup> Permohonan rehabilitasi diajukan kepada Pengadilan Niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan..<sup>27</sup>

### 1.5.2 Tinjauan Umum Lelang

#### 1.5.2.1. Pengertian Lelang

Pada dasarnya lelang sendiri sudah lama ada di Indonesia hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan lelang atau *vendureglement* tahun 1908, dalam peraturan ini yang dimaksud lelang disamaartikan dengan penjualan di muka umum. Definisi “penjualan dimuka” umum ialah pelelangan dan penjualan

---

<sup>25</sup> Zainal Asikinhal, *Op.cit.*, hal 71

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal 153

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hal 84

barang, yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin menurun atau dengan pendaftara harga, atau dimana orang – orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang – orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No 150/PMK.06/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2006 tentang pelaksanaan lelang disebutkan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. dari definisi diatas tampak bahwa lelang merupakan penjualan yang terbuka kepada khalayak umum yang mana khalayak umum akan menawarkan barang yang akan di lelang sesuai dengan harga yang telah dibuka atas barang tersebut. Sedangkan harga meningkat dan menurun hal ini akan disebabkan pada kondisi pelelangan itu sendiri, apabila dengan harga tertentu tidak ada yang membeli

---

<sup>28</sup> Rochmat Soemitro, Peraturan Dan Instruksi Lelang, Eresco, Bandung, 1987, hal 1

maka harga akan diturunkan, akan tetapi penurunan tersebut juga mempunyai batasan tertentu sebab secara umum sebelum dilakukan pelelangan biasanya sudah ditentukan berapa harga minimal barang yang akan dilelang tersebut. Terlepas dari hal tersebut pada dasarnya tujuan utama lelang dalam masalah harga pasti untuk mencapai harga yang maksimal dan dalam hal ini juga dibutuhkan ketegasan, disiplin dari pejabat lelang agar tujuan lelang itu dapat tercapai dengan baik.

Kalau pasal 200 ayat 1 HIR atau pasal 215 ayat 1 RBG dikaitkan dengan pasal 1 peraturan lelang ( LN 1908 No 189 ), akan ditemukan pengertian yang sebenarnya dari penjualan lelang, yang dapat dieinci sebagai berikut :

1. Penjualan di muka umum harta kekayaan tergugat yang telah disita eksekusi. Atau dengan kata lain, menjual dimuka umum barang sitaan milik tergugat ( debitur )
2. Penjualan dimuka umum ( pelelangan ) hanya boleh dilakukan didepan juru lelang. Dengan kata lain, penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang ( juru lelang ); dan



3. Cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat, atau makin menurun melalui penawaran secara tertulis ( penawaran dengan pendaftaran )<sup>29</sup>

Dalam hal kepailitan sendiri lelang diatur dalam pasal 185 UUK dan PKPU yang mana dalam undang - undang tersebut penjualan harta pailit dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Lelang dilakukan dengan cara dimuka umum.
2. Dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan atas seizing hakim pengawas.

#### 1.5.2.2 Pejabat Yang Berwenang Melelang

Pada dasarnya pejabat yang dapat melakukan lelang ialah pejabat yang diberi mandat oleh undang – undang untuk melakukan lelang, karena tidak semua pejabat dapat melakukan pelelangan sebagaimana dalam peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini apabila dilihat dari pasal 200 ayat 1 HIR dan Pasal 215 RBG harus dihubungkan dengan pasal 1a peraturan lelang.berdasar pasal 1 a peraturan lelang :

1. Penjualan umum ( penjualan lelang ) hanya boleh dilakukan “juru lelang”.

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kesatu , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal 103

2. Penjualan lelang yang dilakukan seorang yang bukan juru lelang :

1. dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp 10.000; dan
2. tindakan itu dianggap tindak pidana pelanggaran.<sup>30</sup>

Dari pasal 200 HIR dan Pasal 215 RBG maka dapat dilihat bahwa hanya juru lelanglah yang dapat melakukan lelang, dalam hal ini juru lelang terdapat di kantor lelang. jadi segala barang sitaan atau atau dalam kasus perdata apapun apabila akan melakukan pelelangan maka wajib meminta bantuan kantor lelang yang akan menunjuk juru lelang untuk melaksanakannya.

#### 1.5.2.3 Klasifikasi Lelang

Pada dasarnya jenis lelang tersebut dibagi menjadi dua macam yakni lelang eksekusi yang merupakan putusan dari pengadilan dan lelang non eksekusi yang tidak melalui dari putusan pengadilan. Dalam hal ini lelang dibagi menjadi dua macam yaitu :

##### a. Lelang eksekusi

Lelang eksekusi merupakan suatu lelang yang merupakan pelaksanaan dari suatu putusan pengadilan.

---

<sup>30</sup> Ibid., hal 103

Lelang ini merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia.<sup>31</sup>

b. Lelang Non Eksekusi

Jenis lelang ini merupakan penjualan umum diluar pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan yang terdiri dari :

1. Lelang barang milik / dikuasai Negara
2. Lelang sukarela atas barang milik swasta.<sup>32</sup>

#### 1.5.2.4 Asas Lelang

Secara umum dalam pelelangan juga memiliki asas yang harus dijalankan, hal ini penting sekali dalam pelaksanaan lelang agar tujuan dari pelelangan itu dapat terpenuhi dengan baik. Asas lelang sendiri juga mencakup beberapa hal yang mana merupakan lingkup dari lelang itu sendiri baik dari segi prosedurnya, perlindungan hukum bagi pelaksana lelang dan aspek profesionalitas. Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang – undangan yang mengatur asas lelang itu sendiri namun apabila kita cermati klausula – klausula dalam

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap. Op.cit., hal 116

<sup>32</sup> Ibid., hal 117

peraturan perundang – undangan di bidang lelang dapat ditemukan adanya asas lelang yaitu :

1. Asas keterbukaan  
Menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang dalam undang – undang. Asas ini untuk mencegah terjadinya praktek persaingan tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme ( KKN ).
2. Asas Keadilan  
Mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Hal ini untuk mencegah terjadinya berkepihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya kepada kepentingan penjual. Khusus kepada lelang eksekusi, penjual tidak boleh menentukan harga limit sewenag – wenang yang mengakibatkan merugikan pihak tereksekusi.
3. Asas Kepastian Hukum  
Menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akte otentik. Risalahlelang digunakan penjual atau pemilik barang, pembeli, dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajiban.
4. Asas Efisiensi  
Akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya relative murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada waktu itu juga.
5. Asas Akuntabilitas  
Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak

yang berkepentingan. Pertanggung jawaban lelang melalui administrasi dan pengelolaan uang lelang.<sup>33</sup>

#### 1.5.2.5 Mekanisme Lelang Secara Umum

Dalam hal pelaksanaan lelang juga menganut aturan – aturan yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pelaksanaan lelang secara umum mempunyai mekanisme yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjual barangnya dalam lelang. mekanisme tersebut secara umum sebagai berikut :

1. Surat permohonan lelang
2. Penelitian oleh Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang
3. Surat Penetapan Lelang.
4. Pengumuman Lelang.
5. Penyetoran uang jaminan.
6. Lelang.
7. Risalah lelang.<sup>34</sup>

Pembahasan :

1. Surat Permohonan lelang  
 Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 93 / PMK.06 / 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan bahwa untuk melaksanakan lelang harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan lelang dalam bentuk surat permohonan kepada kantor lelang
  - a. Setiap Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang, mengajukan permohonan kepada kepala kantor lelang
  - b. Permohonan diajukan secara tertulis
  - c. Permohonan disertai dengan dokumen yang berisi syarat – syarat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Departemen Keuangan, Pengetahuan Lelang : penghapusan BMN, [http : .bppk.depkeu.go.id/webpkn/index.php?option...gid.../](http://bppk.depkeu.go.id/webpkn/index.php?option...gid.../), diakses pada hari Rabu, tanggal 02 maret 2013 ; 20.00

<sup>34</sup> Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit., hal 128

Hal ini juga sesuai dengan pasal 10 ayat ( 1 ) PMK No 93 / PMK.06 / 2010 yaitu :

Penjual / Pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya.

Disini penjual wajib mengajukan permohonan lelang apabila ingin melakukan penjualan secara lelang. Dalam hal kepailitan maka surat permohonan lelang diajukan oleh kurator, hal ini karena pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator. Akan tetapi khusus pemegang hak istimewa maka pemegang jaminan yang mengajukan permohonan.

2. Penelitian Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.

Penelitian oleh KPKNL bertujuan untuk memeriksa surat kelengkapan permohonan lelang dari pemohon lelang. termasuk dokumen – dokumen persyaratan lelang, seperti salinan foto copy surat keputusan penunjukan penjual, syarat lelang dari penjual, daftar barang yang akan dijual.

3. Surat Penetapan Lelang

Dalam hal ini surat penetapan merupakan surat yang diajukan kepada kepala KPKNL, hal ini guna meminta penetapan tentang jadwal lelang.

4. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang merupakan suatu hal penting dalam mekanisme lelang, hal ini dikarenakan atau bertujuan untuk memberitahu kepada khalayak umum agar mengetahui dan datang atau mengikuti lelang tersebut. Sebab dalam pengumuman lelang juga berisikan tentang identitas penjual, waktu tempat pelaksanaan lelang, nama dan jenis barang, lokasi luas apabila yang dilelang tanah. Dari hal diatas dapat diambil kesimpulan

- a. Dari segi tujuan pengumuman lelang merupakan usaha atau upaya mengumpulkan peminat yang akan ikut ambil bagian dalam pelelangan yang akan dilaksanakan
- b. Dari segi hukum, pengumuman lelang merupakan persyaratan formil keabsahan penjualan secara lelang.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit., hal 141 - 142

5. Penyetoran uang jaminan

Uang jaminan penawaran lelang adalah uang yang disetor kepada kantor lelang / balai lelang pejabat lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang.<sup>37</sup> Uang jaminan dalam lelang merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi calon pembeli barang lelang Agar dapat menjadi peserta lelang, hal ini disebabkan untuk menghindari apabila peserta pemenang lelang tidak melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran terhadap barang lelang. sedangkan bagi peserta yang kalah dalam penawaran lelang uang jainan akan dikembalikan kepada peserta lelang.

6. Lelang

Lelang merupakan suatu proses yang mana penjual menawarkan barang kepada pembeli ( peserta lelang ) Dalam hal ini penjual menawarkan barang yang akan dijual kepada peserta lelang dan akan mencari penawaran teringgi dari peserta lelang tersebut. Apabila lelang tersebut laku maka peserta yang menang lelang harus melakukan pelunasan terhadap harga yang ia tawarkan.

7. Risalah lelang

Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sebab apabila tidak ada risalah, Pelaksanaan lelang yang demikian tidak memberi kepastian hukum tentang hal – hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak tercatat secara jelas sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.<sup>38</sup>

### 1.5.3. Tinjauan Umum Kurator

#### 1.5.3.1 Kedudukan Kurator Dalam Hukum Pailit

Secara umum tugas kurator sangatlah berat, hal ini dikarenakan tugas pemberesan harta pailit harus dilakukan dengan seksama dan hati – hati serta memiliki resiko yang

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.06 / 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 angka ( 10 )

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit., hal 169

sangat tinggi dalam pelaksanaannya. Dalam hal menjalankan tugasnya, Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari pengadilan niaga sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi ( pasal 16 ayat ( 1 ) undang – undang kepailitan ) ini adalah konsekuensi hukum dari sifat serta merta ( pasal 8 ayat ( 7 ) undang – undang kepailitan).<sup>39</sup> dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator tidak dapat dengan bebas melakukan tugasnya melainkan harus mengacu pada undang – undang. Untuk melakukan tindakannya curator haruslah memperhatikan, antara lain hal – hal sebagai berikut :

1. Apakah dia berwenang melakukan hal tersebut
2. Apakah merupakan saat yang tepat ( terutama secara ekonomi dan bisnis ) melakukan tindakan – tindakan tertentu
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan / izin / keikutsertaan dari pihak – pihak tertentu, seperti dari hakim pengawas, pengadilan niaga, panitia kreditur, debitur, dan sebagainya
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedut tertentu, seperti dalam rapat kuorum tertentu, harus dalam siding yang dihadiri / dipimpin oleh hakim pengawas, dan sebagainya
5. Harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan – tindakan tertentu, apakah melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, Op.cit., hal 42

<sup>40</sup> Ibid., hal 44



### 1.5.3.2 Wewenang Kurator

Wewenang berarti hak untuk melakukan sesuatu yang mana ia dapat melakukan pekerjaannya dengan mengambil keputusan – keputusan dalam menjalankan tugasnya dan wewenang juga menghasilkan suatu tanggung jawab yang harus diembannya. Hal ini juga berlaku bagi kurator, dalam hal ini kurator juga mempunyai wewenang dalam bidang pekerjaannya yang melakukan pemberesan harta pailit. Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu orga debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
2. Dapat melakukan peminjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit.
3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas ( pasal 107 UU Kepailitan ).
4. Berwenang melakukan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin hakim pengawas ( pasal 109 UU Kepailitan )
5. Dapat melakukan rapat dengan kreditor, untuk meminta nasihat.
6. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung.

7. Dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit
8. Kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit ( pasal 104 UU Kepailitan )
9. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit ( pasal 105 ayat ( 1 ) UU Kepailitan )
10. Berwenag menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya ( pasal 106 UU Kepailitan )
11. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, curator dapat menggunakan jasa harta debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas ( pasal 186 UU Kepailitan )
12. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil melakukan penjualan benda yang menjadi anggunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga , dan biaya kepada curator ( pasal 60 ayat ( 1 ) UU Kepailitan )
13. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor untuk meminta nasihat. ( pasal 82 UU Kepailitan )
14. Kurator dengan siizin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitur, baik benda bergerak dalam rangka eksekusi sudah demikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan ( pasal 33 UU Kepailitan )
15. Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali ( pasal 107 ayat ( 1 ) UU Kepailitan )<sup>41</sup>

#### 1.5.3.3 Tanggung Jawab Kurator

Dalam hal melaksanakan tugasnya kurator dituntu untuk sangat hati – hati dikarenakan langkah - langkah yang

---

<sup>41</sup> Jono, Op.cit., Hal 148 - 149

dilakukan kurator terhadap harta pailit akan berimbas ke seluruh pihak. Dalam hal ini kita dapat melihat pada pasal 16 ayat 2 UU Kepailitan yang mana inti dari pada pasal tersebut mengatakan dengan jelas bahwa seluruh tindakan yang telah diambil oleh kurator sekalipun putusan pailit batal di kasasi atau PK maka tindakan yang diambil oleh kurator tetap dianggap sah dan mengikat debitor, Hal inilah yang mengharuskan kurator berhati – hati dalam menjalankan tugasnya. Selain itu setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak disengaja maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 72 UU Kepailitan.<sup>42</sup> dari hal diatas maka kurator tidak dapat seenaknya sendiri dalam menjalankan tugasnya agar tidak merugikan para kreditur akibat kelalaiannya yang merugikan harta pailit tersebut.

#### 1.5.3.4 Kurator Sementara

Dalam hukum kepailitan , kurator dibedakan menjadi dua macam yaitu kurator tetap dan kurator sementara juga dikenal dengan adanya kurator sementara, hal ini tertuang dalam pasal 10 UUK dan PKPU. Dalam hal tugas dari kurator

---

<sup>42</sup> Ibid., hal 151

sementara tersebut tugasnya sangat terbatas berbeda bila dibandingkan kurator tetap. kurator hanya bertugas sebagai “supervisor”. Maksudnya hanya melakukan pengawasan terhadap debitur, khususnya pengawasan terhadap :

1. Pengelolaan usaha debitur
2. Pembayaran kepada debitur
3. Pengalihan harta debitur
4. Penjaminan harta debitur.<sup>43</sup>

Tujuan dari pengangkatan kurator sementara ini dikarenakan sebelum ada putusan pernyataan pailit berarti debitur masih dapat atau masih berwenang dalam kepengurusan harta bendanya, sehingga untuk menghindari adanya perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditor seperti mengalihkan harta kekayaannya, menghibahkan harta bendanya yang mana hal tersebut dapat merugikan kepentingan kreditor maka hal inilah alasan dibutuhkan kurator sementara guna mengawasi perbuatan – perbuatan debitur tersebut sampai ada putusan pengadilan.

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, Op.cit., hal 62

## 1.6 METODE PENELITIAN

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif.

Dikarenakan memberikan permasalahan fakta – fakta yang terjadi di lapangan. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut penelitian perpustakaan atau study dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain<sup>44</sup>. Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada :

- a. Penelitian terhadap azas – azas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah – kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum; dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan baik sinkronisasi vertikal ( beda derajat ) ataupun secara horizontal ( sama derajat / sederajat )  
Sinkronisasi vertical merupakan sinkronisasi yang didasarkan atas hierarki suatu peraturan perundang – undangan. Misalnya antara undang – undang dasar 1945 dengan ketetapan MPR atau peraturan pelaksanaannya, seperti undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan sebagainya. Sinkronisasi horizontal, merupakan sinkronisasi terhadap aturan perundangan yang mengatur tentang berbagaibidang yang mempunyai hubungan fungsional. Misalnya sinkronisasi antara undang – undang dengan peraturan pemerintah atau antara keputusan presiden dengan keputusan presiden.
- d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan – perkembangan hukum. Biasanya dalam penelitian demikian, pada setiap analisa yang dilakukan akan

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta ,2008, hal 13

mempergunakan perbandingan – perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.

- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum; merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan – perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.<sup>45</sup>

#### 1.6.2 Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder, yang mana data sekunder merupakan penelitian kepustakaan. Data sekunder sendiri memiliki dua bahan hukum yakni bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penjelasan kedua bahan hukum tersebut sebagai berikut :

##### 1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. Undang – Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan no 93 / PMK 06 / 2010 tentang pelaksanaan lelang
- c. Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara PER-03 / KN / 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Yang mana bahan hukum sekunder merupakan karya – karya ilmiah atau buku – buku yang dapat membantu dalam hal penulisan.

---

<sup>45</sup> Ibid., hal 14 - 15

### 3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, dan lain sebagainya.

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui :

##### a. Study pustaka

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “ trial and error”. Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa study kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.<sup>46</sup>

##### b. Wawancara

Dalam hal ini metode wawancara merupakan langkah yang digunakan untuk menanyai langsung kepada seseorang yang mengetahui penelitian ini, wawancara tersebut dilakukan kepada Hakim Pengadilan Niaga dan Juru Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 2011, Hal 112

### c. Observasi

Observasi merupakan langkah penelitian guna mencari jawaban dari penelitian tersebut dimana observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Niaga Dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.

#### 1.6.4 Metode Analisa Data

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan kontruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan atau secara kuantitatif. Kadang – kadang penyajian hasil – hasil penelitian ( sebagai hasil pengolahan data ) disatukan dengan analisa data. Tidak jarang pula bahwa kedua hal itu, dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada hal yang terakhir, maka penyajian hasil penelitian adalah semata mata deskriptif. Dalam hal tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada salah satu cara; seringkali sponsor penelitian menghendaki format yang tertentu. Pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif dan kuantitatif, pada hakekatnya dua cara yang saling melengkapi, oleh karena kedua cara tersebut mempunyai keuntungan dan kelemahan masing – masing.<sup>47</sup>

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini merupakan suatu kesatu pemikiran yang utuh dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Dalam penulisan

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1984, Hal 68 - 69



ini memberikan gambaran yang terdapat dalam empat bab yakni sebagai berikut :

Bab Kesatu dalam penulisan hukum ini berisikan tentang pendahuluan yakni latar belakang permasalahan, yang mana dalam latar belakang permasalahan ini berisikan tentang alasan masalah itu perlu diteliti dan berdasarkan permasalahan itu lahirlah sub bab ke dua yakni perumusan masalah yang merupakan suatu hal yang akan dijawab. Selanjutnya disajikan tujuan penelitian yang merupakan tujuan penulis melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Selanjutnya manfaat penelitian merupakan hal yang akan diberikan apabila penulisan telah usai, kajian pustaka dalam hal ini berisikan tentang landasan teori yang mana mendukung dalam penelitian ini, sistematika penulisan berisi tentang gambaran – gambaran yang diteliti.

Bab Kedua, Pada bab ini dijelaskan alasan penolakan lelang. Bab ini akan diuraikan ke dalam dua sub bab, dengan sub bab pertama berisi tentang adanya gugatan perlawanan dari pihak ketiga ( *derden verzet* ). Kemudian sub bab kedua yaitu kesalahan administrasi dalam hal pengajuan permohonan lelang.

Bab Ketiga, Dalam bab ini diuraikan permasalahan kedua yaitu upaya hukum setelah terjadinya penolakan lelang tersebut. Dalam bab ini diuraikan ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama tentang konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan putusan pailit apabila terjadi gugatan perlawanan dari

pihak ketiga, sub bab kedua berisi tentang mekanisme pengajuan gugatan perlawanan di Pengadilan Niaga Surabaya.

Bab Keempat, Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah diuraikan dari bab – bab sebelumnya, juga berisi tentang saran dan kesimpulan terhadap permasalahan tersebut, serta dapat menjadi manfaat bagi permasalahan tersebut.